

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA. 018 TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023

**Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Sulawesi Utara**



Kampus Pertanian Kalasey Kotak Pos 1345 Manado 95013

Telp/Fax. (0341) 838637

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Manado, 31 Desember 2023
Kepala Pengguna Anggaran,

Ir. Agus Salim, MP
NIP. 196708171996031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

- A. Penjelasan Umum
- B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - B.2. Belanja
 - B.3. Belanja Pegawai
 - B.4. Belanja Barang
 - B.5. Belanja Modal
 - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - C.1.2. Piutang Bukan Pajak
 - C.1.3. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
 - C.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
 - C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
 - C.1.6. Persediaan
 - C.2. Aset Tetap
 - C.2.1. Tanah
 - C.2.2. Peralatan dan Mesin
 - C.2.3. Gedung dan Bangunan
 - C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.2.5. Aset Tetap Lainnya
 - C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.3. Piutang Jangka Panjang
 - C.4. Aset Lainnya
 - C.4.1. Aset Tak Berwujud
 - C.4.2. Aset Lain-lain
 - C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
 - C.5. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.5.2. Uang Muka dari KPPN
 - C.6. Ekuitas
 - C.6.1. Ekuitas
- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan
 - D.6. Beban Perjalanan Dinas
 - D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Lain-lain
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manado, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,



r. A. Mussalim, MP
NIP. 196108171996031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara Tahunan Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp86.417.329.00 atau mencapai 77% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp111.861.000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp8.862.101.943.00 atau mencapai 100% dari alokasi anggaran sebesar Rp8.897.813.000.00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp119.969.120.388.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp57.322.380.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp119.813.261.916.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 98.536.092.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp21.487.902.00 dan Rp 119.947.632.486.00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp82.656.923.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp9.732.713.060.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai –Rp9.650.056.137.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit –Rp9.624.185.731.00 dan Surplus Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar –Rp9.624.185.731.00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp120.796.133.603.00 ditambah Defisit-LO sebesar –Rp9.624.185.731.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.775.684.614.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp119.947.632.486.00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023			31 Desember 2022
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	111,861,000.00	86,417,329.00	77	207,218,086.00
Jumlah Pendapatan		111.861.000.00	86,417,329.00	77	207,218,086.00
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	3,798,199,000.00	3,787,154,387.00	100	5,776,420,558.00
Belanja Barang	B.4.	4,999,614,000.00	4,975,260,463.00	100	2,712,219,085.00
Belanja Modal	B.5.	100.000.000.00	99,687,093.00	100	99,990,000.00
Jumlah Belanja		8,897,813,000.00	8,862,101,943.00	100	8,588,629,643.00

II. NERACA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0.00	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2.	0.00	0.00
Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	63,068,200.00	66,458,200.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.4.	-6,306,820.00	-6,645,820.00
Persediaan	C.1.5.	561,000.00	28,911,000.00
Jumlah Aset Lancar		57,322,380.00	88,723,380.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	93,116,242,000.00	93,116,242,000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	10,250,451,036.00	10,150,763,943.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	30,017,950,904.00	30,017,950,904.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	4,070,750,590.00	4,070,750,590.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	30,000,000.00	30,000,000.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-17,672,132,614.00	-16,760,571,179.00
Jumlah Aset Tetap		119,813,261,916.00	120,625,136,258.00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	86,550,000.00	86,550,000.00
Aset Lain-lain	C.4.2.	1,543,218,402.00	1,543,218,402.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-1,531,232,310.00	-1,529,491,198.00
Jumlah Aset Lainnya		98,536,092.00	100,277,204.00
Jumlah Aset		119,969,120,388.00	120,814,136,842.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	21,487,902.00	18,003,239.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.2.	0.00	0.00
Uang Muka dari KPPN	C.5.3.	0.00	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.3.	0.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		21,487,902.00	18,003,239.00
Jumlah Kewajiban		21,487,902.00	18,003,239.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	119,947,632,486.00	120,796,133,603.00
Jumlah Ekuitas		119,947,632,486.00	120,796,133,603.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		120,265,711,517.00	120,814,136,842.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	82,656,923.00	102,620,679.00
JUMLAH PENDAPATAN		82,656,923.00	102,620,679.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3,787,154,387.00	5,776,420,558.00
Beban Persediaan	D.3.	188,833,800.00	104,561,550.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3,009,658,909.00	1,926,797,598.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	370,863,932.00	295,167,997.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1,463,238,485.00	389,527,479.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	913,302,547.00	1,916,521,411.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	-339,000.00	301,500.00
JUMLAH BEBAN		9,732,713,060.00	10,408,695,093.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-9,650,056,137.00	-10,306,074,414.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0.00	31,125,407.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0.00	-16,680,000.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	25,870,406.00	64,457,000.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		25,870,406.00	78,782,407.00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-9,624,185,731.00	-10,227,292,007.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1.	120,796,133,603.00	122,641,414,053.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-9,624,185,731.00	-10,227,292,007.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0.00	6,000,000.00
Koreksi Lain-lain	E.3.1.	0.00	6,000,000.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	8,775,684,614.00	8,381,411,557.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-848,501,117.00	-1,839,880,450.00
EKUITAS AKHIR	E.6.	119,947,632,486.00	120,801,533,603.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban

dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	111,861,000.00	111,861,000.00
Jumlah Pendapatan	111,861,000.00	111,861,000.00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4,854,141,000.00	3,756,699,000.00
Belanja Lembur	41,500,000.00	41,500,000.00
Belanja Barang Operasional	1,001,205,000.00	958,368,000.00
Belanja Barang Non Operasional	295,834,000.00	1,725,838,000.00
Belanja Barang Persediaan	62,225,000.00	137,642,000.00
Belanja Jasa	277,400,000.00	340,397,000.00
Belanja Pemeliharaan	332,734,000.00	368,859,000.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	340,200,000.00	1,468,510,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	100,000,000.00
Jumlah Belanja	7,205,239,000.00	8,897,813,000.00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp86.417.329.00 atau mencapai 77.25% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp111.861.000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0.00	3,390,000.00	0.00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	111,861,000.00	82,656,923.00	73.89
Pendapatan Lain-Lain	0.00	370,406.00	0.00
Jumlah	111,861,000.00	86,417,329.00	77.25

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami penurunan sebesar 58.29% dibandingkan TA 2022. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	3,390,000.00	62,480,300.00	-94.57
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	82,656,923.00	133,746,086.00	-38.19
Pendapatan Lain-Lain	370,406.00	10.991.700.00	-96.63
Jumlah	86,417,329.00	207,218,086.00	-58.29

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp8,862,101.943.00 atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp8,897,813,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2023

Uraian	2023		
Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	3,798,199,000.00	3,787,154,480.00	100
Belanja Barang	4,999,614,000.00	4,975,260,463.00	100
Belanja Modal	100.000.000.00	99,687,093.00	100
Total Belanja Kotor	8,897,813,000.00	8,862,102,036.00	100
Pengembalian Belanja		93.00	0.00
Total Belanja	8,897,813,000.00	8,862,101,943.00	100

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 3.18% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya revisi DIPA dan RKAKL

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	%	Realisasi 30 September 2022	.%
Belanja Pegawai	3,787,154,387.00	100	5,776,420,558.00	96
Belanja Barang	4,975,260,463.00	100	2,712,219,085.00	66
Belanja Modal	99,687,093.00	0	99,990,000.00	100
Total Belanja	8,862,101,943.00	100	8,588,629,643.00	84

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.787.154.387.00 dan Rp5.776.420.558.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar -34.43% dari TA 2022 Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya revisi DIPA
2. Adanya 3 (tiga) orang pegawai yang pensiun sampai periode Desember 2023
3. Adanya 1 (satu) orang pegawai yang meninggal sampai periode Desember 2023

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,745,718,730.00	5,732,238,949.00	-34.65
Belanja Lembur	41,435,750.00	49,432,000.00	-16.17
Jumlah Belanja Kotor	3,787,154,480.00	5,781,670,949.00	-34.49
Pengembalian Belanja Pegawai	93.00	5,250,391.00	-99.99
Jumlah Belanja	3,787,154,387.00	5,776,420,558.00	-34.43

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.975.260.463.00 dan Rp2.712.219.085.00. Realisasi belanja barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 83.43% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya revisi anggaran.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	955,614,860.00	948,466,252.00	0.75
Belanja Barang Non Operasional	1,711,275,569.00	739,049,500.00	131.5
Belanja Barang Persediaan	137,592,010.00	106,217,975.00	29.53
Belanja Jasa	339,283,817.00	239,173,207.00	41.58
Belanja Pemeliharaan	368,255,722.00	291,046,272.00	26.52
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,463,238,485.00	389,527,479.00	275.64
Jumlah Belanja Kotor	4,975,260,463.00	2,713,480,685.00	83.35
Pengembalian Belanja Barang	0.00	1,261,600.00	0
Jumlah Belanja	4,975,260,463.00	2,712,219,085.00	83.43

Belanja Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Tahunan Tahun 2023

Keg/Output	Akun Belanja	Pagu Revisi DIPA	Realisasi	Sisa	Uraian Belanja
1809.994.522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4,000,000	85.000	3.915.000	- Biaya Rapid Test (Antigen) - Biaya SWAB Test

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp99.687.093.00 dan Rp99.990.000.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 0.30% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena perbedaan harga dan barang yang dibeli pada TA 2022 dan TA 2023.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.687.093.00	99.990.000.00	-0.30
Jumlah Belanja Kotor	99.687.093.00	99.990.000.00	-0.30
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	99.687.093.00	99.990.000.00	-0.30

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp99.687.093.00 dan Rp99.990.000.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami penurunan sebesar 0.30% dibandingkan TA 2022. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan harga dan barang yang dibeli pada TA 2022 dan TA 2023.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.687.093.00	99.990.000.00	-0.30
Jumlah Belanja Kotor	99.687.093.00	99.990.000.00	-0.30
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	99.687.093.00	99.990.000.00	-0.30

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023
Saldo UP	0.00
Kuitansi UP	0.00
Jumlah	0.00

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp63.068.200.00 dan Rp66.458.200.00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	63.068.200.00	66,458,200.00
Jumlah	63.068.200.00	66.458.200.00

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp63.068.200.00 yang merupakan Piutang TP/TGR yang belum terselesaikan.

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar –Rp 6,306,820.00 dan –Rp6.645.820.00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp561.000.00 dan Rp28.911.000.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	0.00	0.00
Bahan Baku	0.00	28,350,000
Persediaan Lainnya	561.000.00	561.000.00
Jumlah	561.000.00	28.911.000.00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Rp93,116,242,000.00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.250.451.036.00 dan Rp10.150.763.943.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023	10.150.763.943.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	0.00
Saldo per 30 Juni 2023	10.150.763.943.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0.00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	10.150.763.943.00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp30,017,950,904.00 dan Rp30,017,950,904.00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4,070,750,590.00 dan Rp4,070,750,590.00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp30,000,000.00 dan Rp30,000,000.00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar -Rp17.672.132.614.00 dan -Rp16.760.571.179.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	10.150.763.943.00	- 9.033.001.522.00	1.117.782.421.00
2.	Gedung dan Bangunan	30.017.950.904.00	- 6.110.559.125.00	23,907.391.779.00

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,070,750,590.00	-1.617.010.532.00	2.453.740.058.00
4.	Aset Tetap Lainnya	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
Akumulasi Penyusutan		44.269.465.437.00	-16.760.571.179.00	27.508.894.258.00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp86,550,000.00 dan Rp86,550,000.00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud Lainnya	74,000,000.00
Software	12,550,000.00
Jumlah	86,550,000.00

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.543.218.402.00 dan Rp1.543.218.402.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-1.531.232.310.00 dan Rp-1.529.491.198.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	86,550,000.00	-12,550,000.00	74,000,000.00
2.	Aset Lain-lain	1,543,218,402.00	- 1,518,682,310.00	24,536,092.00
Jumlah		1.629.768.402.00	-1.531.232.310.00	98.536.092.00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga**

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21.487.902.00 dan Rp18.003.239.00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	21.487.902.00	18.003.239.00
Jumlah	21.487.902.00	18.003.239.00

Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat Belanja Barang yang masih dibayar/Utang kepada Pihak Ketiga senilai Rp21.487.902.00. Hal ini dikarenakan adanya biaya langganan listrik, telepon dan internet periode Desember yang harus dibayar di bulan Januari 2024.

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. EKUITAS**C.6. Ekuitas**

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp119.947.632.486.00 dan Rp120.796.133.603.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset

dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 86,417,329

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp86.417.329.00 dan Rp207.218.086.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Anggaran Lain-lain	370,406.00	10,991,700.00	-96.63
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	82,656,923.00	133,746,086.00	-38.19
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	3,390,000.00	62,480,300.00	-94.57
Jumlah	86,417,329.00	207,218,086.00	-58.29

Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya senilai Rp82.656.923.00 merupakan hasil penjualan pertanian dan perkebunan Kebun Percobaan Pandu dan digabungkan dengan Pendapatan Sewa, Tanah, Gedung dan Bangunan yang merupakan hasil sewa rumah dinas pegawai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.787.154.387.00 dan Rp5,776.420.558.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2,650,274,100.00	3,741,789,780.00	-29.17
Beban Pembulatan Gaji PNS	35,260.00	47,544.00	-25.83
Beban Tunj. Anak PNS	46,334,264.00	57,304,654.00	-19.14

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Beras PNS	131,369,880.00	173,952,840.00	-24.47
Beban Tunj. Fungsional PNS	305,920,000.00	841,830,000.00	-63.66
Beban Tunj. PPh PNS	14,077,576.00	53,181,851.00	-73.52
Beban Tunj. Struktural PNS	17,640,000.00	17,640,000.00	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	172,872,650.00	249,698,280.00	-30.76
Beban Tunjangan Umum PNS	58,175,000.00	68,160,000.00	-14.64
Beban Uang Lembur	41,435,750.00	49,432,000.00	-16.17
Beban Uang Makan PNS	349,020,000.00	528,634,000.00	-33.97
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-93.00	-391.00	-76.21
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0.00	-5,250,000.00	-100
Jumlah	3,787,154,387.00	5,776,420,558.00	-34.43

Beban pegawai senilai Rp3.787.154.387,00 merupakan hak gaji, tunjangan dan hak lainnya bagi pegawai selang periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 dan telah dibayarkan kepada seluruh pegawai di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp188.833.800.00 dan Rp104.561.550.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 30 September 2023 dan 30 September 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	53,850,000.00	6,156,000.00	774.75
Beban Persediaan konsumsi	134,983,800.00	98,405,550.00	37.17
Beban persediaan lainnya	0.00	0.00	0.00
Jumlah	188,833,800.00	104,561,550.00	80.59

Beban persediaan senilai Rp188.833.800.00 merupakan barang persediaan yang telah dimanfaatkan baik untuk kegiatan perkantoran maupun teknis standarisasi di lapangan selang periode Tahunan Tahun 2023.

.D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.009.658.909.00.00 dan Rp1.926.797.598.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Bahan	1,322,565,569.00	69,343,200.00	1807,25
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	0.00	0
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	21,000,000.00	-100.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	369,460,000.00	650,456,300.00	-43.19
Beban Barang Operasional Lainnya	41,507,050.00	1,553,860.00	2571.22
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	111,276,000.00	122,529,000.00	-91.83
Beban Honor Output Kegiatan	19,250,000.00	19,250,000.00	0
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	85,000.00	782,000.00	-89.13
Beban Jasa Profesi	77,550,000.00	17,000,000.00	355.88
Beban Keperluan Perkantoran	798,708,259.00	779,385,892.00	2.47
Beban Langganan Listrik	213,243,554.00	221,531,230.00	-3.74
Beban Langganan Telepon	1,236,852.00	1,230,216.00	0.53
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	8,620,000.00	23,997,500.00	-64.07
Beban Sewa	0.00	0.00	0.00
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja		-1,261,600.00	-100.00
Jumlah	3,009,658,909.00	1,926,797,598.00	56.20

Beban barang dan jasa senilai Rp3.009.658.909.00 merupakan beban barang dan jasa untuk mendukung kegiatan sesuai tupoksi baik kegiatan perkantoran dan kegiatan teknis di lapangan.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp370,863,932.00 dan Rp295.167.997.00.. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 September 2023	Realisasi 30 September 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	127,613,020.00	90,348,409.00	41.24
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	240,642,702.00	200,697,863.00	19.90
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,608,210.00	4,121,725.00	-36.72
Beban Persediaan suku cadang	0.00	0.00	0
Jumlah	370,863,932.00	295,167,997.00	25.64

Beban pemeliharaan senilai Rp370,863,932.00 merupakan biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pemeliharaan asset tetap ataupun asset lainnya baik peralatan dan mesin seperti kendaraan, computer, AC dan lain-lain juga pemeliharaan asset gedung dan bangunan.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.463.238.485.00 dan Rp389.527.479.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1,221,277,419.00	372,277,479.00	228.05
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	111,061,066.00	0.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	130,900,000.00	17,250,000.00	658.84
Jumlah	1,463,238,485.00	389,527,479.00	275.64

Beban perjalanan dinas senilai Rp1.463.238.485.00 merupakan biaya perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan sesuai tupoksi satuan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara selang Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp913.302.547.00 dan Rp1.916.521.411.00. Beban penyusutan adalah merupakan

beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	542,071,472.00	1,084,142,919.00	-49.99
Beban Penyusutan Irigasi	19,033,574.00	38,067,148.00	-50.00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	86,936,691.00	173,873,386.00	-50.00
Beban Penyusutan Jaringan	14,510,689.00	29,021,380.00	-50.00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,741,112.00	3,482,223.00	-49.99
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	249,009,009.00	587,934,355.00	-57.64
Jumlah	913,302,547.00	1,916,521,411.00.	-52.34

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-339.000.00 dan Rp-301.500.00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNPB	-205,000.00	-301,500.00	-32.00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-134,000.00	0.00	100
Jumlah	-339,000.00	-301,500.00	12.43

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi

entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0.00	-16.800.000.00	-100.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0.00	31,125,407.00	-100.00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0.00	0.00	-100.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	25,870,406.00	64,457,000.00	-59.86
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0.00	0.00	0.00
Jumlah	25,870,406.00	78,782,407.00	-67.16

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp120.796.133.603.00 dan Rp122.641.414.053.00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp-9,624,185,731.00 dan Rp-10,227,292,007.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp6.000.000.00.

E.3.1. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp6.000.000.00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8,775,684,614.00 dan Rp8,381,411,557.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	8,862,101,943.00
Diterima dari Entitas Lain	-86,417,329.00
Jumlah	8,775,684,614.00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 saldo DDEL adalah sebesar Rp-86.417.329.00 sedangkan DKEL sebesar Rp8.862.101.943.00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar 119,947,632,486.00 dan 120,801,533,603.00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

- Adanya revisi DIPA karena adanya jenis kegiatan baru yaitu Perencanaan Standar Instrumen Spesifik Lokasi di Sulawesi Utara.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara terletak di Kampus Pertanian Kalasey yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai. Dimana Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja.

Sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara tentang Pembentukan Pengelola Anggaran Tahun 2023 antara lain ditetapkan :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | : Ir. Agussalim, MP |
| 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | : Sri Ika Novita Manangin, SE |
| 3. Pejabat Penandatangan SPM | : Jany H.H.A.Sumampouw, S.Pi |
| 4. Bendahara Pengeluaran | : Hantari Karina E.,A.Md |
| 5. Bendahara Penerima | : Laurencia Nagara, SAP |
| 6. Petugas SAKPA | : Hantari Karina E.,A.Md. |
| 7. Petugas SIMAK-BMN | : Haerani, SE |
| 8. Petugas Persediaan | : Haerani, SE |